

**Peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik  
Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Presiden  
Di Kota Tegal**

**Ahmad Zulfikar Al Farizi**  
Universitas Pancasakti Tegal  
[Alfarizahmad511@gmail.com](mailto:Alfarizahmad511@gmail.com)

**R. Samidi**  
Universitas Pancasakti Tegal  
[rsamidi90@gmail.com](mailto:rsamidi90@gmail.com)

**Abstrak**

Setiap warga negara Indonesia pada prinsip dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sejajar dan hak yang sama tanpa terkecuali, termasuk hak untuk terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana telah dijamin secara tegas dan diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak politik bagi penyandang disabilitas pada dasarnya telah diatur dan dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam Pasal 13, yang menyebutkan secara jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak serta kesempatan yang setara tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari, mengetahui dampak dari program-program Yayasan Disabilitas Tegal Bahari, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi program partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Tegal. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Disabilitas Tegal Bahari berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik melalui edukasi hak pilih, pelatihan pemilu, simulasi pencoblosan, pendataan pemilih, dan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Kemudian, program yayasan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi politik penyandang disabilitas. Edukasi dan pelatihan membuat mereka lebih memahami hak pilih dan lebih siap menggunakan hak politiknya, meskipun keberhasilan partisipasi tetap dipengaruhi oleh aksesibilitas TPS, pendampingan, kondisi individu, dan lingkungan sosial. Sedangkan partisipasi politik penyandang disabilitas didukung oleh peran keluarga, kerja sama antar lembaga, lingkungan inklusif, dan fasilitas ramah disabilitas, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan informasi, akses TPS, kendala fisik, SDM, dan koordinasi.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas; Partisipasi Politik; Warga Negara;

**Abstract**

*Every Indonesian citizen in principle has equal legal standing and the same rights without exception, including the right to be actively involved and participate in government, as has been expressly guaranteed and regulated in the country's constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Political rights for people with disabilities have basically been regulated and guaranteed in the provisions of Law Number 8 of 2016, especially in Article 13, which clearly states that people with disabilities have equal rights and opportunities without discrimination to participate in the election process.*

*This study aims to analyze the role of the Tegal Bahari Disability Foundation, determine the impact of its programs, and identify supporting and inhibiting factors that influence the political*

*participation program for people with disabilities in Tegal City. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and triangulation techniques.*

*The research results show that the Tegal Bahari Disability Foundation plays a significant role in increasing political participation through voting rights education, election training, voting simulations, voter data collection, and collaboration with the General Elections Commission (KPU) and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu). Furthermore, the foundation's programs have a positive impact on improving the quality and quantity of political participation of people with disabilities. Education and training make them more aware of their voting rights and better prepared to exercise their political rights, although successful participation is still influenced by polling station accessibility, mentoring, individual conditions, and the social environment. Meanwhile, political participation of people with disabilities is supported by the role of family, inter-institutional cooperation, an inclusive environment, and disability-friendly facilities, but is still hampered by limited information, polling station access, physical constraints, human resources, and coordination.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities; Political Participation; Citizens;*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia secara luas dikenal sebagai sebuah negara hukum yang memiliki komitmen kuat dan teguh dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang merupakan landasan kodrati serta hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, sangat penting untuk segera merumuskan dan menerapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu serta pilkada yang lebih inklusif dan berpihak kepada penyandang disabilitas, agar mereka dapat menjalankan hak politiknya secara lebih adil, merata, dan mudah diakses (Triyudha, 2012). Hak politik bagi penyandang disabilitas pada dasarnya telah diatur dan dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam Pasal 13, yang menyebutkan secara jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak serta kesempatan yang setara tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh KPU, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tercatat mencapai angka 81,78%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tingkat partisipasi dalam Pilpres 2019 yang mencapai angka 81,97% (Simanjuntak, 2024). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, hasilnya hingga saat ini masih belum optimal. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, masih ditemukan berbagai kendala signifikan, seperti minimnya fasilitas pendukung bagi pemilih disabilitas, serta masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julia Angela Siregar (2019) menunjukkan bahwa kerja sama yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berhasil meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas melalui kegiatan sosialisasi intensif dan penyediaan fasilitas pemilu yang lebih ramah disabilitas.

Yayasan Disabilitas Tegal Bahari merupakan tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi ragam penyandang disabilitas sehingga mereka dapat merasa diterima dan memiliki lingkungan yang mendukung. Namun, peran yayasan ini dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu Presiden 2024 di Kota Tegal belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis kontribusi Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam upaya tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi program partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Tegal. Mengingat keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas baik dari aksesibilitas maupun dalam pemenuhan hak politiknya.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang lebih menekankan pada keaslian data yang diperoleh langsung dari lapangan daripada hanya berfokus pada pengujian teori semata. Kemudian untuk sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer yang berasal dari wawancara langsung dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi serta studi pustaka dan dokumentasi (Sugiyono, 2013:225). Lalu, Wujud data dalam penelitian ini berbentuk hasil wawancara, sumber-sumber tertulis, hasil observasi, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Ketua dan pengurus Yayasan Disabilitas Tegal Bahari, empat orang penyandang disabilitas anggota yayasan, pihak KPU Kota Tegal, serta Bawaslu Kota Tegal.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur teknis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Proses ini dilakukan secara teknis dan sistematis agar data yang diperoleh memiliki kredibilitas yang tinggi (Sugiyono, 2013:224). Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta teknik triangulasi. Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan baik sebelum maupun sesudah proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data dianggap tuntas.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini memaparkan deskripsi hasil dan pembahasan pada penelitian ini mengenai Peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu Presiden Tahun 2024 di Kota Tegal.

### **1. Peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu Presiden Tahun 2024 di Kota Tegal**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari tampak melalui tiga bentuk utama, yaitu: Sosialisasi dan Edukasi Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas; Pelatihan Mekanisme Pemilu dan Pendampingan Pemilih Disabilitas; serta Kerja Sama dan Komunikasi Yayasan dengan KPU dan Bawaslu. Yayasan berupaya membangun kesadaran politik anggota melalui pendekatan dialogis, di mana penyandang disabilitas diposisikan sebagai subjek, bukan objek, dalam kegiatan pendidikan pemilih. Selain itu, yayasan melaksanakan pelatihan mekanisme pemilu dalam bentuk simulasi pencoblosan dan penjelasan alur pemungutan suara di TPS untuk membekali pengetahuan dan simulasi sebelum hari pemungutan suara.

Secara konseptual, temuan ini selaras dengan pandangan Miriam Budiardjo (2008) yang menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Sosialisasi dan edukasi hak pilih yang dilakukan Yayasan Disabilitas Tegal Bahari berperan penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas menyadari dan menggunakan hak politiknya secara setara. Pelatihan mekanisme pemilu dalam bentuk simulasi pencoblosan dan pengenalan alur pemungutan suara merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan penyandang disabilitas, yang sejalan dengan teori Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Komunitas dari Karl-Dieter Korte (2005) bahwa lembaga swadaya masyarakat berperan memperkuat kapasitas komunitas dan memperluas kesempatan partisipasi politik kelompok marginal.

### **2. Dampak Program-Program Yayasan Disabilitas Tegal Bahari terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Tegal pada Pemilu Presiden 2024**

Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak program Yayasan Disabilitas Tegal Bahari tampak pada tiga aspek utama, yaitu: (1) peningkatan kesadaran politik penyandang disabilitas, (2) keikutsertaan penyandang disabilitas dalam Pemilu Presiden 2024, serta (3) pengalaman penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih di TPS. Data dari KPU Kota Tegal mencatat bahwa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT meningkat dari 352 orang pada Pemilu 2019 menjadi 1.801 orang pada Pemilu 2024, dan jumlah pemilih disabilitas yang hadir ke TPS juga meningkat dari 299 orang pada 2019 menjadi 1.043 orang pada 2024. Sehingga program sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan Yayasan Disabilitas Tegal Bahari berdampak pada meningkatnya kesadaran politik penyandang disabilitas yang terlihat dari

perubahan sikap anggota yang semula bingung dan pasif menjadi lebih memahami hak pilih, tahapan pemilu, serta berani menyampaikan pendapat. Dampak program yayasan ini juga berkaitan dengan meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas mengenai cara mengambil keputusan politik secara mandiri. Dari sudut pandang *Rational Choice*, meningkatnya kesadaran politik juga dapat dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional individu karena setelah memperoleh informasi yang cukup, penyandang disabilitas menilai bahwa ikut memilih memberikan manfaat bagi kepentingan mereka.

Dampak program yayasan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik melalui edukasi, penguatan jaringan sosial, dan rasionalisasi pilihan politik. Sejalan dengan Teori Kapabilitas, Sen (2009) menekankan bahwa partisipasi tidak hanya ditentukan oleh hak formal, tetapi juga oleh kemampuan nyata individu untuk menggunakan hak tersebut, di mana program yayasan meningkatkan kapabilitas penyandang disabilitas melalui pengetahuan, keberanian, dan kesiapan psikologis untuk datang ke TPS. Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa program Yayasan Disabilitas Tegal Bahari berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran politik, keikutsertaan dalam pemilu, dan pengalaman menggunakan hak pilih di TPS.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Program Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu Presiden 2024 di Kota Tegal

Pada hasil penelitian ini faktor pendukung utama meliputi dukungan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan lingkungan sosial, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemilu yang ramah disabilitas seperti surat suara Braille dan akses TPS yang relatif mudah bagi pengguna kursi roda. Namun, terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan akses informasi pemilu, kendala fisik, psikologis, dan sosial penyandang disabilitas, serta keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas di TPS. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum meratanya distribusi informasi pemilu kepada seluruh penyandang disabilitas karena keterbatasan SDM dan ketiadaan data *by name by address*.

Dukungan keluarga dan lingkungan sosial merupakan perpanjangan tangan dari kewajiban negara dalam menciptakan pemilu yang inklusif, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa negara wajib menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Di sisi lain, kendala internal seperti rasa minder, ketergantungan pada pendamping, serta keterbatasan mobilitas merupakan hasil interaksi antara kondisi individu dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendukung sesuai perspektif WHO (2001). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas membutuhkan kebijakan yang tidak hanya inklusif secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasi teknis di lapangan.

## D. Simpulan

Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan hasil sinergi antara yayasan, KPU, Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

### 1. Peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Yayasan Disabilitas Tegal Bahari berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik melalui edukasi hak pilih, pelatihan pemilu, simulasi pencoblosan, pendataan pemilih, dan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Peran ini memperkuat kesadaran, kepercayaan diri, dan kapabilitas penyandang disabilitas sebagai pemilih yang mandiri, meskipun jangkauan dan kesinambungan program masih perlu ditingkatkan.

### 2. Dampak Program-Program Yayasan Disabilitas Tegal Bahari terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Program yayasan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi politik penyandang disabilitas. Edukasi dan pelatihan membuat mereka lebih memahami hak pilih dan lebih siap menggunakan hak politiknya, meskipun keberhasilan

partisipasi tetap dipengaruhi oleh aksesibilitas TPS, pendampingan, kondisi individu, dan lingkungan sosial.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas  
Partisipasi politik penyandang disabilitas didukung oleh peran keluarga, kerja sama antar lembaga, lingkungan inklusif, dan fasilitas ramah disabilitas, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan informasi, akses TPS, kendala fisik, SDM, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan aksesibilitas, pendataan, dan sinergi berkelanjutan antar pihak.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Amartya Sen. 2009. *The Idea of Justice*. Harvard University Press.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

David Korten. 2005. *The Great Turning: From Empire to Earth Community*. Kumarian Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal:**

Angela Siregar. Julia 2020 Kerjasama Kpu Kota Jambi Dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilu Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi. *Journal Jurnal Political Science*, 19 Oktober 2020.

Aria Triyudha. 2012. Sinta Wahid: Hak Politik Penyandang Cacat Masih Terabaikan. *Jurnal Jakarta*, 9 Juli 2012.